

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Lancar di Kalimantan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/444478/pertamina-patra-niaga-pastikan-stok-bbm-dan-lpg-lancar-di-kalimantan>

PT Pertamina Patra Niaga aktifkan Posko Satuan Tugas (Satgas) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk memastikan ketersediaan stok dan penyaluran BBM serta LPG lancar di Kalimantan. Satgas tersebut efektif mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 di kantor Regional dan seluruh lokasi suplai point BBM dan LPG yang tersebar di wilayah Kalimantan mulai mengawal dan memantau pasokan serta kelancaran distribusi. Dia mengatakan, diperkirakan untuk Natal dan tahun baru akan terjadi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline (Pertamax Turbo, Pertamax dan Peralite) hingga 3,7 persen, BBM jenis gasoil (Dex Series dan Biosolar) sebanyak 1,1 persen, LPG sebesar 4,5 persen dan Avtur sebesar 0,4 persen dari rata-rata normal harian di wilayah Kalimantan. Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri estimasi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline mencapai 3,8 persen, BBM jenis gasoil sebesar 1,1 persen, kenaikan konsumsi LPG 3,8 persen dan untuk Avtur sebesar 1,0 persen dari rata-rata normal harian.

Pada tahun ini, Patra Niaga di Kalimantan memproyeksikan akan terjadi peningkatan permintaan BBM dan LPG sepanjang Satgas Natal dan tahun baru 2024-2025 di wilayah Kalimantan. Dijelaskan Alex, peningkatan diperkirakan akan terjadi sebesar 3,7 persen untuk BBM jenis gasoline dari 8.046 Kiloliter per hari di saat normal menjadi 8.345 KL saat Nataru, BBM jenis gasoil sebanyak 1,1 persen dari 3.389 Kiloliter per hari di saat normal menjadi 3.424 KL, LPG sebesar 4,5 persen dari 1.800 MT per hari di saat normal menjadi 1.881 MT sedangkan Avtur yang mengalami kenaikan sebesar 0,4

persen dari 566 KL per hari di saat normal menjadi 571 KL. Sementara untuk Provinsi Kalimantan Selatan, estimasi peningkatan BBM jenis gasoline mencapai 3,8 persen, dari 1.927 KL menjadi 2.000 KL, BBM jenis gasoil sebesar 1,1 persen, dari 837 KL menjadi 847 KL, kenaikan konsumsi LPG sebesar 3,8 persen dari 426 MT menjadi 442 MT dan untuk Avtur sebesar 1,0 persen dari 102 KL menjadi 103 KL dari rata-rata harian normal. Dia menambahkan khusus di beberapa wilayah jalur potensial (jalur toll, jalur wisata, jalur logistik), Pertamina juga menyiagakan SPBU di jalur padat kendaraan dan wisata sebanyak 90 SPBU siaga yang tersebar di Kalimantan Timur sebanyak 24 SPBU, Kalimantan Barat 18 SPBU, Kalimantan Tengah 12, Kalimantan Utara lima SPBU dan Kalimantan Selatan 31 SPBU. Seluruh SPBU beroperasi selama 24 jam, Pertamina juga menyiagakan sebanyak 246 agen LPG siaga di seluruh wilayah Kalimantan. Sementara itu, untuk kuota dan stok BBM dan LPG serta Avtur di seluruh Kalimantan dalam keadaan aman dan Patra Niaga akan mengoptimalkan penyediaan stok tersebut. Terkait ketahanan stok rata-rata ketahanan stok BBM antara 12-18 hari akumulatif, LPG berkisar lima hari dan Avtur berkisar 12 hari. Kami pastikan untuk stok BBM dan LPG aman untuk dua perayaan Natal dan tahun baru. Di beberapa daerah di Kalimantan memang kerap terjadi keterlambatan pasokan bukan karena masalah kuota dan stok tapi lebih ke arah teknis. Alex mencontohkan dari kendala teknis adalah distribusi saat di laut karena cuaca kurang baik sehingga butuh waktu tambahan untuk sandar atau distribusi darat yaitu mobil tangki yang menempuh jarak cukup jauh dengan kondisi jalan yang beragam. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, satgas selain berkoordinasi internal baik Tim Holding maupun Subholding, Pertamina selalu berkoordinasi dengan instansi terkait meliputi Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI dan PT Telkom Indonesia dan lainnya. Sebagai sub holding Commercial dan Trading dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga tentunya akan terus berkomitmen memastikan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. Kami berharap dengan adanya posko satgas ini kepastian penyaluran dan kesiapan stok BBM serta LPG serta Avtur dapat dioptimalkan dengan baik. Bukan itu saja, ucapnya, bagi masyarakat atau konsumen yang membutuhkan informasi ketersediaan stok ataupun memberikan masukan serta saran juga dapat menghubungi kontak Pertamina 135 atau melalui aplikasi MyPertamina. Khusus di Regional Kalimantan masyarakat dapat menghubungi Call Center Satgas Regional Kalimantan di nomor 08115410135.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/444478/pertamina-patra-niaga-pastikan-stok-bbm-dan-lpg-lancar-di-kalimantan>, 27 Desember 2024.

2. <https://ikn.kompas.com/read/2024/12/16/143613987/pertamina-pastikan-stok-bbm-dan-lpg-di-kalimantan-cukup-untuk-nataru>, 27 Desember 2024.

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.

- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat

pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan,

memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/*training* kemaritiman, serta kerja sama antarnegara.

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Struktur APBD

